

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1>

Received: 10 Januari 2021, Revised: 17 Februari 2021, Publish: 3 Maret 2021



KONSEP DASAR EKONOMI PENDIDIKAN PADA TATARAN SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

Suyanto Suyanto¹⁾, Lias Hasibuan²⁾, Kasful Anwar US³⁾

¹⁾UIN STS Jambi, suyantojambi2018@gmail.com

²⁾UIN STS Jambi, Lhas10@yahoo.co.id

³⁾UIN STS Jambi, kasfulanwarus@gmail.com

Corresponding Author: Suyanto Suyanto¹⁾

Abstrak: Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter dan lain-lain khususnya melalui pendidikan ekonomi. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri bisa menghasilkan ekonomi. Semua akan terwujud bila suprastruktur dan infrastruktur saling mendukung. Dalam bidang suprastruktur sistem politik di Indonesia meliputi legislatif, eksekutif dan Yudikatif. Sedangkan infrastruktur yaitu Partai politik, kelompok penekan, kelompok berkepentingan dan media komunikasi politik yang bertindak mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Bersatunya kedua komponen tadi akan dapat mewujudkan pengembangan ekonomi pendidikan yang efektif dan efisien.

Kata Kunci: Dasar ekonomi Pendidikan, Tataran Suprastruktur, Infrastruktur Politik

PENDAHULUAN

Pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan yaitu; sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah

Menurut (Ramayulis, 2006:6) Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebuah proses pendidikan dapat dilaksanakan baik melalui lembaga pendidikan informal maupun formal. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Dengan demikian Sistem pendidikan bisa dipahami sebagai himpunan gagasan atau prinsip-prinsip pendidikan yang saling bertautan yang tergabung menjadi suatu keseluruhan.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa; "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Dalam implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan apabila didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai dan dapat diandalkan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah. Dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu Negara (daerah). Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia jugadiakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tingkat melek huruf yang rendah, pemerataan pendidikan yang rendah, serta standar proses pendidikan yang relatif kurang memenuhi syarat. Dalam mengkaji sistem pendidikan dalam suatu Negara tidak terlepas dari falsafah suatu bangsa tersebut. Ketika negara-negara barat mempunyai falsafah hidup rasionalis, materialis, dan pragmatis maka system pendidikan yang dibuat oleh barat tentu bercorak rasionalis, pragmatis, dan materialis. Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Menurut Undang – undang Dasar 1945 .Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah, negara Indonesia mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam bidang pendidikan terutama dalam hal pendanaan pendidikan. Dalam hal ini pelaksanaan pendidikan harus disertai dengan adanya peningkatan peran sumber dana pendidikan. Kebijakan politik pendidikan Indonesia secara umum dapat dibagi ke dalam empat periode. Pertama kebijakan politik pemerintahan pada masa Pra-kemerdekaan; Kedua, kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama; Ketiga kebijakan politik pemerintahan Indonesia masa Orde Baru; dan keempat kebijakan politik pemerintahan Indonesia pada Orde Reformasi.

PEMBAHASAN

Ekonomi Pendidikan

Beberapa teori yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan yaitu :

a. Teori modal manusia (Human Capital Theory)

Menurut (Rastagi, 2002) yang menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Konsep kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus dan pelatihan. Konsep utama model ini adalah bahwa capital merupakan sesuatu yang didapatkan melalui akumulasi suatu proses tertentu.

Pendapat yang lain Romer (1999) menyatakan bahwa human capital merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. Human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya

(Rosen, 1999). Frank & Bemanke (2007) berpendapat bahwa human capital adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia.

Diperkuat oleh (Alan dkk. 2008). Konsep ini menganggap human capital tidak berasal dari pengalaman manusia. Konsep ketiga memandang human capital melalui perspektif orientasi produksi. Diperkuat lagi oleh Schultz (1961) menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu factor penting dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu Negara.

Inti dari Human capital theory menggunakan konsep bahwa modal utama manusia adalah pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Human investment theory menggunakan konsep mengorbankan sesuatu saat ini demi keuntungan lebih di masa depan

b. Teori pembangunan manusia (Human Development Theory)

Human Development Theory atau pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990). Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut pendapat tersebut rata-rata tidak menggambarkan secara detil kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Ini disebabkan kesenjangan yang ada antara kaya dan miskin yang cenderung tinggi. Inti Human development theory merupakan suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Sustainable Development Theory merupakan konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan.

Kedua teori tersebut menjelaskan proses pendidikan yang mempunyai hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pola hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi baik itu langsung maupun tidak langsung seperti model fungsi produksi, menyiapkan lapangan kerja bahwa pendidikan dilaksanakan dalam rangka mencari pengetahuan untuk bekerja. antara ekonomi dan pendidikan dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Ekonomi mampu mendorong pendidikan berjalan secara efektif dan efisien sementara hasil pendidikan akan menciptakan manusia yang memiliki kualitas sehingga mampu menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi, sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik

Menurut Mark Blaug (1976:19) : “.... A good case can now be made for the view that educational expenditure does partake to a surprising degree of the nature of investment in enhanced future output. To that extent, the consequences of the education in the sense of skill embodied in people may be viewed as human capital, which is not to say that people themselves are being treated capital. In other words, the resources devoted to maintaining and increasing the stock of human beings, but the resources devoted to maintaining and increasing the stock of human beings remain consumption by virtue of the abolition of slavery”.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa sebuah kasus yang baik sekarang dapat dibuat untuk pandangan bahwa pengeluaran pendidikan benar-benar mengambil bagian yang mengejutkan dari sifat investasi dalam peningkatan hasil di masa depan. Se jauh itu, konsekuensi pendidikan dalam arti ketrampilan yang terkandung dalam diri manusia dapat dipandang sebagai modal manusia, yang tidak berarti bahwa manusia itu sendiri diperlukan sebagai investasi pada manusia, tetapi sumber daya yang dikhususkan untuk memelihara dan meningkatkan persediaan manusia tetap dikonsumsi melalui penghapusan perbudakan.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Jones (1985:4) yang menyatakan bahwa *“The people have certain skills, habit, and knowledge, which they sell to employers in the form of their wage salaried labor, and which can be expected to provide them a flow of income over their lifetimes. Furthermore, human capital can be analogized in some respects to physical capital because both are used together to produce a stream of income over some period of years”*.

Pendapat tersebut menyatakan bahwa Orang-orang memiliki keterampilan, kebiasaan, dan pengetahuan tertentu, yang mereka jual kepada majikan dalam bentuk upah tenaga kerja yang digaji, dan yang dapat diharapkan memberi mereka aliran pendapatan selama hidup mereka. Selanjutnya, modal manusia dapat dianalogikan dalam beberapa hal untuk modal fisik karena keduanya digunakan bersama-sama untuk menghasilkan aliran pendapatan selama beberapa periode tahun”.

Suprastruktur Dan Infrastruktur Politik Pendidikan

Dari segi bahasa menurut Kamus Besar Indonesia, Suprastruktur politik berasal dari dua kata yaitu supra dan struktur, Supra berarti “di atas atau di luar “ sedangkan struktur berarti “ bangunan, struktur, susunan, kerangka “. Dalam pengertian yang cukup mudah adalah lembaga tinggi Negara.

Bagaimana hubungan pendidikan dan politik? Menurut (Albernethy, David dan Coombe, Trevor. 1965: 287) . Hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitudes), masalah pengangguran (employment), dan peranan politik kaum cendekia (the political role of the intelligentsia).

Setelah amandemen UUD 1945, lembaga – lembaga Negara di Indonesia terdiri dari :

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Lembaga kepresidenan
- 5) Mahkamah Agung (MA)
- 6) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 7) Komisi Yudisial (KY)
- 8) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga-lembaga tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Lembaga Legislatif; Legislatif diwakili oleh DPR dan untuk daerah ada DPD. Sedangkan untuk majelisnya ada MPR. Ketiga lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan berbeda. DPR mempunyai fungsi membentuk UU, membahas RAPBN bersama presiden secara garis besar 3 fungsi utamanya yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Sedangkan untuk DPD berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan UU tertentu dan mengusul dari masalah yang ada di daerah. Dan terakhir MPR berfungsi untuk menetapkan UUD serta melantik presiden dan wakil presiden.
- b. Lembaga Eksekutif; Kekuasaannya berada di tangan presiden serta dibantu wakil presiden beserta menteri dan bawahannya lainnya untuk berfungsi memegang

kekuasaan pemerintahan menurut UUD, serta bisa menetapkan peraturan pemerintahan untuk kemaslahatan bersama.

- c. Lembaga Yudikatif; Lembaga ini merupakan kehakiman yang berisikan Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Inspektif. Mereka berfungsi dan bertujuan sebagai penyelesaian masalah yang ada di masyarakat. Biasanya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan di pengadilan negeri.

Sedangkan Infrastruktur berasal dari dua kata yaitu “ Infra” berarti atas dan kata “struktur “ berarti “ Tata bangunan atau tata hubungan “ Jadi Infrastruktur Politik adalah Infrastruktur yang berhubungan dengan lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan yang dalam kegiatannya secara langsung atau tidak saling berpengaruh. Sehingga lembaga tersebut mempengaruhi kebijakan lembaga negara. Sehingga tujuan dan fungsi infrastruktur politik sangat penting peranannya dalam bernegara. Yang termasuk infrastruktur yaitu lembaga-lembaga itu antara lain :

1. Partai politik

Berdasarkan nomor urut peserta pemilu 2019 sesuai hasil yang diambil wakil masing – masing partai sebagai berikut :

- 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- 3) PDI Perjuangan (PDIP)
- 4) Partai Golkar
- 5) Partai Nasdem
- 6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
- 7) Partai Beringin Karya (Berkarya)
- 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- 9) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- 10) Partai Persatuan Pembangunan (PP)
- 11) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- 12) Partai amanat Nasional (PSI)
- 13) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- 14) Partai Demokrat

2. Kelompok penekan

Kelompok penekan tersebut merupakan kelompok civil society yang berperan memberikan tekanan pada pemerintahan dan berusaha mempengaruhi kebijakannya. Perbedaannya dari kelompok kepentingan, Kelompok penekan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum. tidak untuk kepentingan spesifik kelompok tersebut. Kelompok ini biasanya ormas yang telah memiliki legitimasi kuat di masyarakat. Contoh kelompok penekan ini Ormas Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, IDI dan lain – lain.

4. Media komunikasi politik

Media komunikasi politik mempunyai peranan sebagai media politik terhadap masyarakat luas dengan tujuan agar khalayak mengetahui agenda politik dan dari masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap elit politik/pemerintah. Contohnya, surat kabar, TV, majalah dan lain – lain.

5. Kelompok Kepentingan

Kelompok ini ialah kelompok civil society yang berperan dalam memberikan tekanan pada pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan. Contoh kelompok ini yaitu organisasi buruh yang memberikan tekanan kebijakan yang berpihak pada kaum buruh seperti upah layak, perlindungan tenaga kerja dan lain-lain.

Dalam masyarakat terutama dalam system politi di Indonesia pasti banyak berbagai kepentingan yang perlu ditengahi oleh Negara.Maka infrastruktur politik adalah jalan terbaik sebagai penyambung berbagai kepentingan yang ada dan

Bias mengkomunikasikan antara masyarakat, golongan, institusi dan berbagai sector kehidupan dengan pihak pemerintah sebagai lembaga sebagai lembaga. Politik pendidikan merupakan penjelasan atau pemahaman umum yang dintentukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan.

Politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah suatu Negara yang berkenaan dengan pendidikan.Politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis,melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan.Politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggara pendidikan yang dijalankan demi tercapainya tujuan negara,karena tujuan Negara menjadi sasaran,maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara.

Lalu bagaimana kaitan antara pendidikan dan politik ? Menurut (Borah, R.R. 2012:91) sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat diketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. bahwa Pemerintah India membuat begitu banyak kebijakan dan amandemen untuk meningkatkan standar pendidikan. Pemerintah begitu ketat dalam menerapkan kebijakan dan amandemen baru.

Menurut (Wales, J., Magee, A., Nicolai, S. 2016:56) Penerapan analisis penyelesaian politik dapat membantu menjelaskan pola kemajuan dalam akses dan kualitas pendidikan, dan untuk mengidentifikasi insentif politik yang mendasarinya.

Tidak berlebihan kiranya bahwa pendidikan sebagai salah satu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan Negara.Pendidikan selalu berdasarkan keinginan pola penguasa yang menetapkan kurikulum.Kira kiranya politik ternyata sangat berkaitan erat dengan pendidikan.Politik adalah kebijakan, siapa yang menguasai politik atau siapa yang menjadi pimpinan dialah yang memudian menentukan arah pendidikan.Siapa yang berkuasa selalu berusaha untuk mendapatkan nilai plus bagi rakyatnya.Karena pendidikan adalah termasuk hajat orang banyak, maka siapa yang dapat menentukan arah pendidikan ini dengan baik,baik jangka panjang maupun menengah akan berinvestasi besar bagi kepentingan kedepan.

Bagaimana dengan pendanaan pendidikan , sebagaimana yang termuat dalam pasal 31 ayat(4) UUD 1945 bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20 % baik dari APBN maupun APBD. Anggaran 20 % ini termasuk didalamnya digunakan untuk sarana maupun sarana pendidikan.

Politik tersebut berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru,sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Penyediaan guru yang profesional selama ini terabaikan. Jika jabatan profesionalitas guru disejajarkan dengan jabatan profesional lainnya seperti dokter dan pengacara, maka profesionalitas guru masih tertinggal.UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menuntut guru sebagai pendidikan bertaraf S1. Kebijakan sertifikasi guru, awalnya sebagai upaya untuk menjadikan guru yang ada menjadi guru yang profesional. Namun beberapa indikasi menunjukkan kebijakan sertifikasi guru gagal menjadikan guru menjadi profesional. Karena guru yang mengejar sertifikasi hanya semata-mata bermotif mengejar tunjangan sertifikasi, setelah mereka mendapatkan sertifikat, tidak ada tanda-tanda mereka berubah menjadi guru profesional, baik dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, menilai, dan mendiagnosa berbagai masalah yang dihadapi peserta didik terlihat tidak bedanya antara guru yang bersertifikat dengan yang belum bersertifikat. Salah satu ketidakberesan

dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah adanya politik organisasi pendidikan dalam mempersiapkan guru profesional.

PENUTUP

Pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Artinya apa yang menjadi aspek pendidikan mengandung unsur – unsur politik. Begitu juga kegiatan atau aktifitas politik juga ada kaitanya dengan aspek pendidikan. Keduanya saling mengisi atau bahu membahu dan saling mengisi dalam membentuk perilaku masyarakat. Politik juga berpengaruh terhadap sumberdaya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan. Salah satu hal penting dalam pengembangan proses pembelajaran yang bermakna adalah tersedianya guru-guru yang profesional. Politik pendidikan adalah segala usaha, kebijakan dan siasat yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya politik pendidikan adalah penjelasan atau pemahaman umum yang ditentukan oleh penguasa pendidikan tertinggi untuk mengarahkan pemikiran dan menentukan tindakan dengan perangkat pendidikan dalam berbagai kesamaan dan keanekaragaman beserta tujuan dan program untuk merealisasikannya. Dengan demikian politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa peraturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan Negara .

Dua lembaga didalam sistem politik di Indonesia sangat menentukan arah kebijakan politik ekonomi pendidikan yaitu Suprastruktur yang termasuk didalamnya lembaga legislatif, eksekutif dan Yudikatif serta lembaga Negara yang bersifat inspektif yaitu BPK Disamping Inprastruktur termasuk didalamnya Partai Politik, Kelompok Penekan, kelompok kepentingan dan media komunikasi politik juga ikut mementukan arah kebijakan pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Alan, K. M. A., Altman, Y., & Roussel, J. 2008. *Employee Training Needs and Perceived Value of Training in the Pearl River Delta of China: A Human Capital Development Approach*. Journal of European Industrial Training, 32(1),2008.
- Albernethy, David dan Coombe, Trevor. *Education and Politics in Developing Countries*. Havard Educational Review. Vol. 35. No.3. 1965
- Borah, R.R.. *Impact of Politics and Concerns with the Indian Education System*. International Journal of Educational Planning & Administration. Volume 2. Number 2 2012
- Imam Barnadib. *Filsafat Pendidikan; Tinjauan Beberapa Aspek dan Proses Pendidikan*. Yogyakarta:
- Rastogi, P. N. *Knowledge Management and Intellectual Capital as a Paradigm of Value Creation*. Human Systems Management, 21(4).2002
- Studying, 1982Nir, A.E. dan Kafle, B.S. *The effect of political stability on public education quality*. International Journal of Educational Management. Vol. 27 No. 2, 2013
- Romer, P. M. *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy, 98(5), 2013.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia. 2006
- Sukasni, A. dan Efendy, H. *The Problematic of Education System in Indonesia and Reform*
- Rosen, H. S. 1999. *Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Schultz, T. W. 1961. Investment in Human Capital. American Economic Review, 51, 1961
- UU Nomor 14 tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
- UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang *anggaran pendidikan*

Agenda. International Journal of Education. Vol. 9. No. 3. 2017
UNDP. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press. 1990.
Wales, J., Magee, A., Nicolai, S. *How does political context shape
education reforms and their success*. Development Progress Dimension
Paper. Vol.06 Agustus 2016